

BERAKHIRNYA ROMANTISME KOLONIAL PRANCIS DI FRANCOPHONE AFRIKA

OLEH: Kurniawati

Dosen Jurusan Sejarah FIS UNJ

Abstrak

Tulisan ini bermaksud memaparkan corak kolonialisme Prancis dan kemudian membandingkan bagaimana hubungan Prancis dan negara-negara jajahannya terutama di Afrika pada masa Perang Dingin dan Pasca Perang Dingin. Dalam memperlakukan negara jajahannya, Prancis memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik itu adalah keinginan Prancis untuk menyebarkan kebudayaannya yang dianggap lebih tinggi dari kebudayaan negara yang dijajahnya. Penyebaran budaya Prancis yang paling terlihat adalah digunakannya bahasa Prancis sebagai bahasa resmi di negara-negara koloninya. Keinginan untuk menyebarkan peradabannya ini tidak berhenti sampai berakhirnya penjajahan tetapi tetap berlanjut hingga masa dekolonisasi. Prancis tetap berusaha mempertahankan hubungan patron-client dengan negara-negara eks-koloninya di Afrika yang disebut Francophone Afrika dengan memberikan bantuan terutama keuangan dan berbagai keistimewaan. Akan tetapi setelah Perang Dingin berakhir Prancis berangsur-angsur mengurangi hubungan istimewanya dengan Francophone Afrika. Pasca Perang Dingin, situasi dunia telah berubah, tidak ada lagi kekhawatiran besar terhadap komunisme yang kerap dijadikan Prancis untuk intervensi ke sejumlah negara Afrika. Selain itu serangkaian skandal dan biaya yang besar untuk menyokong Afrika membuat Prancis melakukan reorientasi kebijakan Afrika-nya.

Pendahuluan

Seperti Belgia, Inggris, Italia, Jerman dan Portugal, hubungan Prancis dan Afrika sudah berlangsung sejak lama dalam ikatan kolonialisme. Ada perbedaan mendasar antara corak penjajahan Prancis dan Inggris. Jika Inggris cenderung melihat tanah jajahan secara pragmatis dari sisi untung rugi, maka Prancis lebih memiliki sisi idealis karena selain mengeksploitir kekayaan koloni juga bermaksud menyebarkan kebudayaannya. Maka, Prancis banyak mengirim misionaris, serdadu, petani kecil dan pegawai rendahan,

kaum terpelajar, dokter, guru, dan insinyur daripada pedagang. Pegawai rendahan dan petani umumnya pindah ke tanah jajahan untuk mencari penghidupan yang lebih baik sedangkan kaum terpelajar menyebrang ke tanah jajahan untuk menyebarkan ide dan cita-cita Revolusi Prancis.

Orang-orang Prancis pada umumnya menganggap tugas utama mereka adalah mengubah orang-orang Afrika menjadi orang Prancis yang lebih beradab. Jules Ferry, arsitek politik imperial Prancis pada 1880-1885 berpendapat bahwa koloni juga

merupakan wilayah Prancis maka tugas orang-orang Prancis di koloni adalah menyebarkan nilai-nilai utama peradaban Prancis.¹ Pendapat Jules Ferry tersebut merupakan jiwa zaman dari masa kolonialisme dan imperialisme. Ada keyakinan dalam pikiran banyak orang Prancis saat itu bahwa wilayah Prancis akan meluas ke seberang Laut Tengah, ke sebelah selatan gurun Sahara dan ke sebelah barat benua Afrika.² Lebih lanjut lagi mereka percaya adanya suatu ikatan kultural dan politik antara Prancis dan jajahannya yang jauh melampaui tujuan-tujuan ekonomi. Keseriusan Prancis untuk “memerancis-kan Afrika” bahkan membuat Prancis pada 1946 menjadikan orang-orang Afrika yang ada di wilayah jajahannya sebagai warga negara Prancis.³

Sejak 1950-1960an, terjadi dekolonisasi besar-besaran di Afrika. Terhadap bekas koloninya di Afrika, Prancis tetap memberikan perhatian dan prioritas yang besar. Prancis pun mempunyai pengaruh dalam *la Francophonie Africaine* yang terdiri dari 18 negara.⁴ Setelah dekolonisasi, Prancis tetap mengistimewakan

¹ C.P.F. Luhulima. *Eropa Sebagai Kekuatan Dunia: Lintasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.. Pp.131-132.

² *Ibid*

³ *After Independence/during the Cold War*
http://www.socsci.flinders.edu.au/global/africa/reb_eccadowd/Afterindependence.htm diakses pada 8 Juni 2010

⁴ Benin, Burkina Faso, Burundi, Chad, Gabon, Guinea, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Mali, Mauritania, Niger, Republik Afrika Tengah, Rwanda, Senegal, Pantai Gading, Togo, Zaire (Komoro, Djibouti sering dimasukkan sebagai negara Francophone meskipun bahasa resmi mereka bukan Prancis)

hubungannya dengan Francophone Afrika karena baginya Francophone Afrika adalah simbol kebesaran Prancis yang akan menguatkan posisi Prancis di dunia. Akan tetapi hubungan saling membutuhkan antara Prancis dan Francophone Afrika memudar seiring dengan berakhirnya Perang Dingin pada 1990an.

Tulisan ini selanjutnya akan memaparkan bagaimana keistimewaan yang diberikan Prancis terhadap ex-koloninya di Afrika semakin pudar terutama setelah berakhirnya Perang Dingin pada 1990an.

Pengaruh Prancis di Francophone Afrika pada era Perang Dingin

Pasca dekolonisasi, hubungan yang terjalin antara Francophone Afrika dan Prancis adalah saling membutuhkan. Bagi Prancis, imperium adalah symbol kebesarannya, tanpanya Prancis hanyalah sebuah negara seperti negara-negara lainnya. Maka makna Francophone Afrika bagi Prancis adalah *pertama*, aspek sentimental tentang hubungan Prancis dan Francophone Afrika; *kedua*, ide mengenai kebesaran Prancis di dunia; dan *ketiga*, keinginan untuk memelihara status Prancis di arena politik internasional.⁵ Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka penyebaran budaya selalu menjadi aspek penting dari kebijakan luar negeri Prancis di Francophone-Afrika.

⁵ Daniela Krosiak. France's Policy Toward Africa Continuity or Change dalam *Africa In International Politics: External Involvement on The Continent* edited by Ian Taylor and Paul Williams, London: Routledge, 2004. p.66

Ketergantungan Francophone Afrika terhadap Prancis terlihat nyata dalam ekonomi. Sejak 1947, Prancis membentuk Franc Zone yaitu bantuan budgeter dan perluasan hubungan dagang negara-negara Francophone dan Prancis yaitu (*Communaute Financiere Africaine*) CFA Franc. CFA Franc dijamin oleh Prancis dalam transaksi internasional sehingga mata uang asing yang dihasilkan ekspor disimpan di Prancis. Zona Franc dan CFA Franc yang bertujuan mengontrol pengeluaran dan sirkulasi mata uang, moneter, regulasi finansial, aktifitas perbankan, alokasi kredit, dan terutama budgeter dan kebijakan ekonomi. Dengan Zona Franc, Prancis mempunyai kekuasaan yang amat besar di Francophone karena bertindak sebagai bank sentral di Francophone Afrika yang berarti mengukuhkan kekuasaannya di Afrika bahkan setelah negara-negara Francophone Afrika merdeka kekuasaan Prancis justru semakin membesar. Dengan memberi bantuan ekonomi yang besar bagi Francophone Afrika, Prancis ingin mengukuhkan posisi istimewanya di Francophone Afrika dengan memastikan tidak ada campurtangan asing lain di sana termasuk dari sekutu Baratnya.

Dalam era Perang Dingin di mana Barat (baca: Amerika Serikat) memusatkan perhatian pada perlawanan komunisme di seluruh dunia, membiarkan Prancis menjadikan Francophone Afrika sebagai “*chase garde*” atau “wilayah berburu pribadi”nya selama tidak bertentangan dengan kepentingannya. Maka tidak ada tentangan terhadap Prancis ketika pada tahun 1960an

melakukan intervensi militer di Mauritania, Gabon, Chad, Togo, Niger dan di Republik Afrika Tengah.

Hubungan sinerjis antara Prancis dan AS di Afrika memang tidak selamanya berjalan mulus. Sebagai contoh tahun 1965 Amerika Serikat mengintervensi Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo) untuk memastikan presiden yang pro-AS-Mobutu Sese Seko berkuasa. Ketidakcocokan juga tampak pada kebijakan dua negara terhadap Benin, Kongo-Brazzaville dan Madagaskar. Prancis dianggap AS bersikap lunak terhadap negara-negara berhaluan Marxis tersebut. Akan tetapi meskipun seringkali berbeda pendapat hubungan Prancis dan Amerika Serikat selama Perang Dingin dinilai kooperatif, berimbang dan dapat diperkirakan.⁶

Sementara itu di kawasan Eropa sendiri menjelang pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa 1950an, timbul pemikiran di Prancis mengenai bagaimana mencegah kemudahan akses terhadap barang dan jasa di yang menjadi tujuan MEE akan menyebabkan Prancis akan menjadi tujuan barang-barang 6 negara MEE untuk mengekspor barangnya ke Afrika dan sebaliknya negara-negara Afrika mengeksport barangnya ke negara-negara MEE dengan bebas bea. Prancis menyadari bahwa diperlukan dana besar untuk mengembangkan pembangunan di Afrika terutama di *Francophone* yang dianggap sebagai kewajiban moral mereka tetapi di sisi

⁶ Peter J Schraeder. *Cold War to Cold Peace: Explaining US-French Competition in Francophone Africa*, <http://business.highbeam.com> diakses pada 8 Juni 2010

lain mereka juga berkeinginan mengembangkan industri Prancis agar sejajar dengan negara-negara MEE lainnya. Maka jalan keluar yang mungkin dilakukan oleh Prancis adalah membagi “beban” Afrika untuk dipikul bersama negara-negara MEE.⁷

Usul Prancis untuk memasukkan 18 negara Afrika dan Madagaskar dalam pengaturan MEE didukung oleh Belgia yang juga mempunyai kepentingan yang sama. Jerman yang tidak merasa memiliki “kewajiban moral” di Afrika akhirnya menyetujui usul Prancis karena tidak ingin menggagalkan usaha pengintegrasian Eropa dan karena tidak dapat menolak argumentasi Prancis bahwa adalah suatu keharusan demi kepentingan “dunia bebas”. Argumentasi Prancis sangat relevan pada saat itu terutama bagi Jerman yang sangat peka dengan isu Perang Dingin.⁸ Hasilnya adalah Asosiasi antara MEE dan 18 negara Afrika ditambah Suriname, Antillen dan jajahan-jajahan Prancis di wilayah Atlantik dan Pasifik yang ditandatangani di Yaundé ibukota Kamerun pada tahun 1963.⁹

Masuknya Inggris ke dalam MEE pada tahun 1973 mendorong dilakukannya kembali negosiasi dengan kelompok AASM dan bekas jajahan Inggris di SSA, Karibia, dan Pasifik. Masuknya Inggris yang membawa serta negara-negara persemakmuran dalam MEE memunculkan dinamika baru dalam MEE yang sebelumnya sangat diwarnai oleh dominasi Prancis. Dengan berbagai kompromi maka

pada tahun 1975 di Lome ibukota Togo ditandatangani perjanjian antara MEE (9 anggota) dengan 46 negara ACP yang dikenal sebagai Lome Convention (1975-1980). Kesepakatan penting dalam Konvensi Lome I adalah pilihan-pilihan *non-reciprocal* untuk sebagian besar ekspor dari ACP ke MEE, kesetaraan antara partner, kebebasan bagi tiap negara untuk menentukan kebijakannya sendiri, dan keamanan hubungan-hubungan yang berdasarkan peningkatan sistem kerjasama. Dalam Lome I ini diperkenalkan sistem STABEX (*system for the stabilization of export*) yang dimaksudkan untuk mengkompensasi turunnya penerimaan ekspor karena fluktuasi harga atau penyaluran komoditas-komoditas.¹⁰

Konvensi Lome II dan III tidak banyak mengalami perubahan dari Konvensi Lome I. Pada Konvensi Lome II yang paling menonjol adalah diperkenalkannya SYSMIN (*System of minerals*) yang membantu industri pertambangan bagi negara-negara yang bergantung pada sektor itu. Sedangkan pada Konvensi Lome III terjadi perubahan pada fokus perhatian dari pengembangan industri kepada pembangunan yang bertumpu pada kemampuan diri sendiri yang berbasis pemenuhan kebutuhan dan keamanan pangan.¹¹

¹⁰

http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/lome_convention_en.htm diakses pada 10 Desember 2006

¹¹ *Ibid.*

⁷ C.P.F. Luhulima. *Op. Cit.* 133-134.

⁸ *Ibid.*, pp. 134-135

⁹ *Ibid.*, p. 137

Pengaruh Prancis pada Francophone Pasca Perang Dingin

Perkembangan dunia dan dalam negeri Prancis pada 1990-an mengubah kebijakan Afrika Prancis yaitu berakhirnya Perang Dingin, isu-isu globalisasi dan munculnya generasi baru pemimpin politik di Paris dan Afrika. Runtuhnya Tembok Berlin yang menandai berakhirnya komunisme, mengurangi “ketakutan” Barat termasuk Prancis akan bahaya komunisme di Afrika. Menteri kerjasama Prancis Jaques Pelletier, pada Januari 1990 mengatakan bahwa apa yang terjadi di Eropa Timur akan berpengaruh pada Afrika juga.¹² Jika pada masa Perang Dingin, Prancis lebih mengutamakan *rayonnement* (penyebaran) budayanya maka pasca Perang Dingin, ia lebih fokus pada kepentingan ekonomi. Sinyal perubahan itu terlihat dengan jelas pada Konvensi Lome (IV) yang diperbaharui tahun 1990. Pada Konvensi Lome IV berlaku selama 10 sejak 1990 ini terjadi perubahan yang signifikan dalam isi dan tujuannya. Tujuan utama dari Konvensi Lome IV adalah mendukung pelaksanaan hak azasi manusia, demokrasi, dan pemerintahan yang bersih; memberdayakan perempuan, pemeliharaan lingkungan; kerjasama desentralisasi kerjasama, diversifikasi ekonomi ACP, meningkatkan sektor swasta, dan meningkatkan kerjasama regional. Dalam Konvensi Lome IV ini tidak ada lagi bantuan ala Sinterklas seperti yang terjadi sebelumnya.¹³

¹² Daniela Kroslak. *Op., Cit* p. 67.

¹³ *Ibid.*

Pada tahun 1993 Doktrin Abidjan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Eduard Balladur menghasilkan pendekatan ekonomi liberal untuk Afrika. Doktrin Abidjan berisi devaluasi mata uang CFA-Franc dan membuka hubungan Prancis dengan negara Afrika non-Francophone seperti Nigeria, Kenya, Zimbabwe, dan Afrika Selatan. Setelah bertahan dengan *fixed rate* sejak 1948, pada Januari 1994 CFA Franc didevaluasi sebanyak 50%. Keputusan devaluasi ini diambil Prancis karena devaluasi dollar 10 tahun sebelumnya dan jatuhnya harga-harga bahan mentah menyebabkan krisis bagi perdagangan negara-negara zona Franc karena mengekspor dalam dollar Amerika sedangkan impor menggunakan mata uang Eropa yang kuat. Maka keputusan untuk mendevaluasi CFA Franc tidak terelakkan lagi karena Prancis tidak mampu lagi menyokong ekonomi Francophone Afrika.¹⁴

Keterlibatan Prancis di Francophone mengalami reorientasi sejak 1990 atau Pasca Perang Dingin juga diakibatkan berbagai skandal. Pada 1990an terjadi skandal Elf-Aquitane yang melibatkan manajer-manajer atas perusahaan minyak terkemuka Prancis itu dan politisi papan atas seperti Roland Dumas dan Charles Pasqua. Akibat skandal tersebut Presiden Jaques Chirac dituduh menghimpun dana ilegal untuk partai selama menjadi walikota Paris. Tuduhan menghimpun dana ilegal juga dituduhkan kepada Michel Roussin-Menteri Kerjasama yang mengurus masalah Afrika.

¹⁴ *Ibid.*, p.71

Skandal lain adalah 'angolagate' yaitu skandal penjualan senjata secara ilegal dan pencucian uang yang melibatkan anak Francois Mitterand, Jean Christophe Mitterand yang pernah menjabat sebagai kepala unit Afrika (1986-1992). Skandal-skandal yang melibatkan pejabat yang ikut menjadi penentu kebijakan Afrika Prancis, menguatkan tuntutan reformasi hubungan Prancis-Afrika dari berbagai kalangan di Prancis ditambah sebelumnya terjadi genosida di Rwanda, krisis di Zaire (Republik Demokratik Kongo sekarang), pemberontakan di Afrika Tengah beberapa tahun sebelumnya.¹⁵

Titik balik perubahan terjadi terutama setelah Rwanda yang merupakan contoh bagaimana kebijakan Prancis dalam rangka menyebarkan budaya Prancis-nya di Afrika dilakukan dengan cara apapun termasuk mendukung rezim otoriter yang rasis. Kebijakan Prancis di Afrika sendiri adalah suatu yang unik karena dipengaruhi oleh banyak pihak dalam pemerintahan yaitu presiden yang memiliki unit Afrika, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, kementerian kerjasama, kementerian keuangan dan dinas rahasia Prancis. Selain jajaran resmi pemerintahan, bukan rahasia lagi jika kebijakan Prancis juga dipengaruhi oleh jaringan direktur perusahaan-perusahaan swasta.¹⁶

Peranan Prancis dalam krisis kemanusiaan di Rwanda yaitu genosida minoritas suku Tutsi oleh suku Hutu 1994 mendapat sorotan

tajam di Paris. Pemerintah Prancis di bawah pimpinan Presiden Mitterand dan PM Eduard Balladur dianggap tahu akan adanya rencana pembantaian suku Tutsi tetapi tidak melakukan tindakan apa pun. Pemerintah Prancis juga dianggap mendukung pemerintah suku Hutu, dengan melindungi para pembunuh dan mensuplai senjata kepada mereka pada saat pembantaian suku Tutsi terjadi. Dua surat kabar terkemuka di Prancis *Le Monde* dan *Le Figaro* memberitakan bahwa Prancis masih mengirim senjata ke Rwanda sekurang-kurangnya hingga sebulan setelah peristiwa pembantaian suku Tutsi.¹⁷ Keterlibatan Prancis di Rwanda ditenggarai disebabkan oleh persaingan Prancis dan Amerika Serikat di Rwanda. Prancis menuduh Amerika Serikat mendukung milisi suku Tutsi karena banyak anggota *Rwandan Patriotic Front* (RPF) yang merupakan milisi suku Tutsi dilatih AS sebagai tentara Uganda. Agaknya Sindrom Fashoda masih menghinggapi Prancis sehingga selalu menganggap kehadiran Anglophone yang juga berarti kehadiran Amerika Serikat di Afrika sebagai ancaman.¹⁸

¹⁷Therese le Clerk. *Who is responsible for the Genocide in Rwanda*, www.wsws.org/sections/category/news.shtm diakses pada 10 desember 2006

¹⁸Krisis Fashoda terjadi pada 1898 adalah suatu peristiwa ketika Prancis dan Inggris sedang melakukan ekspansi kolonial di Afrika. Kedua negara kolonial berambisi menguasai Afrika dari Utara ke Selatan dan sebaliknya hingga keduanya bertemu di Sudan di daerah bernama Fashoda. Khawatir terjadi perang, Prancis memutuskan menarik pasukannya dari Sudan. Krisis Fashoda merupakan peristiwa yang memalukan bagi Prancis sehingga berusaha keras agar peristiwa memalukan seperti itu tidak terjadi lagi khususnya bila berhadapan dengan Inggris atau kemudian Amerika Serikat yang juga Anglo Saxon.

¹⁵ *Ibid*, p.64

¹⁶ Daniela Krosiak. *Op.Cit*, p.62

Serangkaian reformasi terhadap hubungan Prancis-Afrika yang dilakukan antara lain dileburnya kementerian kerjasama ke dalam kementerian luar negeri. Pada 1995, Perdana Menteri Alain Juppe memulai usaha untuk melebur kementerian kerjasama dan kementerian luar negeri. Namun usaha Juppe diblok oleh Presiden Chirac atas nasehat Jaques Foccart yang dikenal sebagai “monsieur Afrique”. Usaha Juppe juga mendapat tentangan keras dari kelompok yang dikenal sebagai “Rue Monsieur” yaitu para mantan menteri seperti mantan menteri luar negeri Michel Jobert dan menteri kerjasama Jean-Pierre Cot. Baru pada 1998, kementerian kerjasama dapat ditempatkan di bawah otoritas kementerian luar negeri.¹⁹

Kebijakan Jospin di Afrika adalah mengintegrasikan kebijakan Afrika Prancis dalam kerangka Eropa. Pada Desember 1998 disepakati Perjanjian St.Malo antara Prancis dan Inggris yang berisi komitmen kedua negara untuk mengharmonisasi kebijakan mereka untuk mendorong kesepakatan UE dalam hak azasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi, dan berkontribusi pada stabilitas Afrika dengan menghapus permasalahan hutang dan meningkatkan level pembangunan. Bagi Prancis, pendekatan multilateral pada kebijakan Afrika akan meringankan bebannya yang sebenarnya memperkuat apa yang telah dilakukannya pada kesepakatan Lome sejak 1975. Dengan pendekatan multilateral anggaran bantuan luar negeri Prancis dapat ditekan, jika pada

1994 mencapai 0,64% dari GDP maka pada tahun 2000 menurun hampir setengahnya yaitu 0,37% dari GDP.²⁰

Di bawah pemerintahan PM de Villepin, Prancis kembali melakukan pendekatan bilateral dalam menjalin hubungannya dengan Afrika. Chirac dan Villepin lebih antusias mengenai Afrika dibandingkan dengan Jospin.²¹ Chirac berasal dari generasi yang menjunjung prinsip “*grandeur de la France*” sehingga cenderung mempertahankan prinsip-prinsip tradisional hubungan Prancis-Afrika.²² Namun situasi yang berkembang mulai 1990-an tidak lagi memungkinkan bagi Chirac atau pemerintahan siapapun di Prancis untuk mempertahankan kebijakan tradisionalnya terhadap Afrika.

Kebijakan Afrika Prancis selanjutnya di bawah pimpinan Presiden Nicholas Sarkozy yang menggantikan Chirac pada Mei 2007 seperti yang diperkirakan lebih tidak menguntungkan bagi Afrika. Sikap keras Sarkozy dalam menyelesaikan permasalahan imigran dinilai akan membahayakan imigran yang banyak berasal dari Afrika. Namun, isu imigran bukan satu-satunya isu karena masih ada isu yang lain seperti masih ditematkannya 10.000 tentara Prancis di Afrika seperti di Chad dan Republik Afrika Tengah. Meskipun Sarkozy mengisyaratkan perhatian

²⁰ *Ibid.*, p. 73

²¹ *Ibid.*, p.69

²² *Ibid.*, p.64.

¹⁹ Daniela Krosiak. *Op., Cit.*, p.63

yang besar terhadap Afrika sebagaimana yang sudah menjadi tradisi Prancis, tetapi perubahan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pada masa Presiden Sarkozy Prancis mengurangi peran militernya di Afrika dan lebih mendorong peran Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih besar.

Kesimpulan

Suatu yang khas yang menjadi ciri penjajahannya di seluruh dunia termasuk di Afrika adalah melakukan penyebaran budaya atau singkatnya “memeranciskan” negara jajahan khususnya Afrika yang kemudian dikenal sebagai Francophone Afrika. Usaha melakukan penyebaran budaya tersebut tidak berhenti dengan kemerdekaan negara-negara tersebut tapi terus berlanjut hingga pasca dekolonisasi. Prancis memainkan peran sebagai “patron” yang terus menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh negara-negara Francophone Afrika.

Pada era Perang Dingin, kepentingan Amerika Serikat untuk mencegah penyebaran komunis di seluruh dunia termasuk di Afrika seringkali sejalan dengan kepentingan Prancis di Afrika dan sebaliknya sehingga hampir tidak ada tentangan terhadap intervensi Prancis di sejumlah negara Afrika dan sebaliknya. Begitu juga tidak ada tentangan terhadap usul Prancis untuk memasukkan negara-negara Francophone Afrika terhadap pengaturan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) karena argumentasi Prancis “demi mempertahankan dunia bebas tidak kuasa ditentang lainnya

seperti Jerman karena argumentasi tersebut sangat relevan dengan situasi dunia di tengah Perang Dingin tengah mencapai puncaknya.

Setelah Perang Dingin berakhir, perubahan kebijakan terhadap Afrika merupakan suatu langkah yang tidak terelakkan bagi Prancis disebabkan faktor-faktor dalam dan luar negeri. Dari luar negeri, runtuhnya Tembok Berlin yang diikuti dengan runtuhnya komunisme di seluruh dunia mengakhiri ketakutan Barat akan meluasnya komunisme di seluruh dunia termasuk di Afrika. Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi Prancis untuk memainkan argumentasi menjaga “dunia bebas” untuk menyakinkan aliansi Baratnya demi kepentingannya di Afrika.

Daftar Pustaka:

- http://ec.europa.eu/development/body/cotonou/lo me_convention_en.htm diakses pada 10 Desember 2006
- Clerk, Therese le. *Who is responsible for the Genocide in Rwanda*, www.wsws.org/sections/category/news.shtml diakses pada 10 desember 2006
- Kroslak, Daniela. *France's Policy Toward Africa Continuity or Change dalam Africa In International Politics: External Involvement on The Continent* edited by Ian Taylor and Paul Williams, London:Routledge, 2004
- Luhulima, C.P.F. *Eropa Sebagai Kekuatan Dunia: Lintasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka

Utama, 1992

Schraeder, Peter J. *Cold War to Cold
Peace: Explaining US-
French Competition in
Francophone Africa*,
[http://business.highbeam
.com](http://business.highbeam.com) diakses pada 8 Juni
2010